

Buku Pedoman Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)



Lembaga Produktivitas Nasional

Sekretariat:

Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan

Website: lpn.go.id; e-mail: secretariat@lpn.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bagian 1 Gambaran Umum

- a. Sejarah
- b. Organisasi, Tugas dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi

Bagian 2 Sekretariat Lembaga Produktivitas Nasional

- a. Fungsi Sekretariat LPN
- b. Struktur Organisasi
- c. Tugas Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja)
- d. Fungsi Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja)

Bagian 3 Fokus Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja)

Bagian 3 Jenis dan Tata Cara Rapat

Bagian 4 Tata Administrasi Organisasi

Bagian 5 Riset dan Kajian

A. SEJARAH LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

1. Periode I (Tahun 1968 s.d. Tahun 1988)

- a. Tahun 1968, Pusat Produktivitas Nasional (PPN) terbentuk (berdasarkan Inpres No. 15 Tahun 1968, memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membentuk Pusat Produktivitas Nasional (PPN) di bawah Departemen Tenaga Kerja);
- b. Tahun 1968, Indonesia resmi menjadi anggota *Asian Productivity Organization (APO)* (dikukuhkan pada saat Governing Body Meeting ke IX, 7 Mei 1968);
- c. Tahun 1984, Dewan Produktivitas Nasional (DPN) dan Dewan Produktivitas Daerah (DPD) terbentuk;
- d. Tahun 1986, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan “*the 5th World Productivity Congress*”;
- e. Tahun 1986, Pemerintah melalui pidato Presiden menetapkan setiap bulan April sebagai bulan Kampanye Produktivitas;
- f. Tahun 1988, Pusat Produktivitas Nasional (PPN) berubah nama menjadi Pusat Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK), berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 525/MEN/1988;

2. Periode II (Tahun 1988 s.d. Tahun 2007)

- a. Tahun 1993, PPTK berubah nama menjadi Direktorat Bina Produktivitas Tenaga Kerja, Ditjen Binalattas (berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 28/Men/1993);
- b. Tahun 1996, bulan Kampanye Produktivitas (April) diubah menjadi bulan Mutu dan Produktivitas yang diselenggarakan setiap bulan November;
- c. Tahun 2001, Direktorat Bina Produktivitas Tenaga Kerja, Ditjen Binalattas berubah nama menjadi Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

- e. Tahun 2002, berubah nama lagi menjadi Direktorat Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.219/MEN/2002);
- f. Tahun 2003, dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Produktivitas (berdasarkan Surat Keputusan Menko bidang Perekonomian No. 39/M.EKON/09/2003);
- g. Tahun 2003, diselenggarakan Konferensi Nasional Produktivitas menghasilkan: Deklarasi, Renstra dan Draft Keppres LPN;
- h. Tahun 2005, Direktorat Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, berubah nama menjadi Direktorat Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/VII/2005);
- i. Tahun 2005, Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) terbentuk, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;
- j. Tahun 2007, Direktorat Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berubah nama menjadi Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.05/MEN/IV/2007);

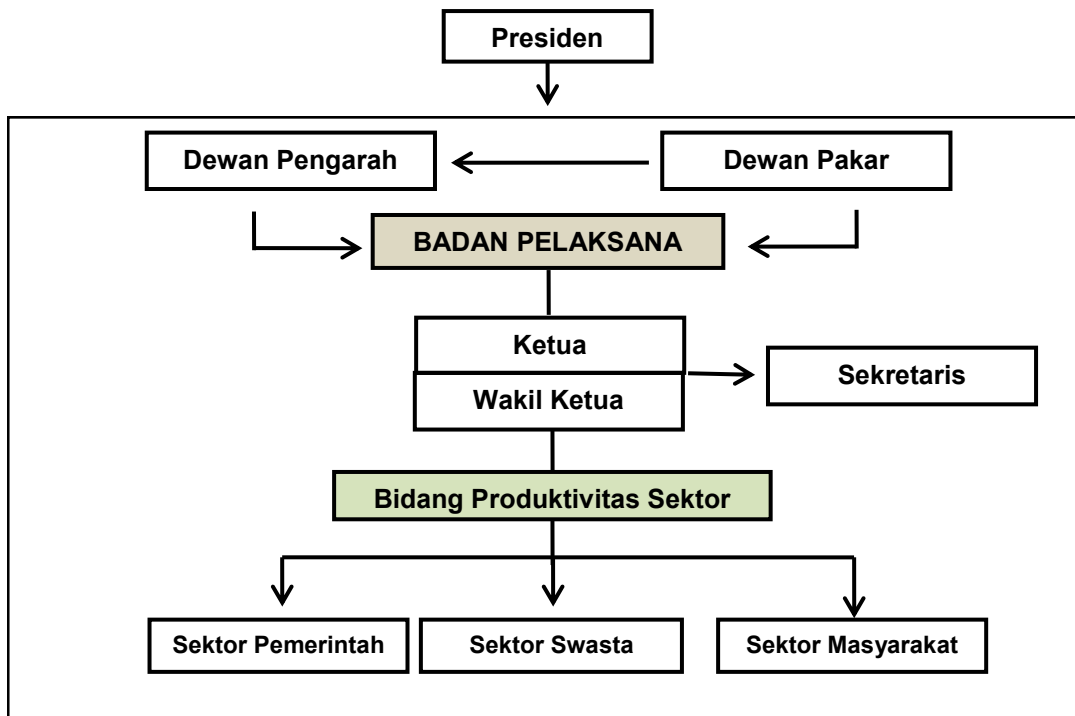
B. Organisasi, Tugas dan Fungsi

1. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden;
2. Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional;
3. Keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) sesuai Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 adalah:
 - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian R.I.
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
 - d. Anggota :
 - 1) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian
 - 2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
 - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan
 - 4) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan
 - 5) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 6) Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 7) Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian

- 9) Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
 - 10) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan
 - 11) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan
 - 12) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan
 - 13) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
 - 14) Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
 - 15) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
 - 16) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 17) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 18) Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
 - 19) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 20) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi
 - 21) Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dibantu oleh Sekretariat, yang dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
 5. Apabila dipandang perlu, Ketua LPN dapat membentuk Kelompok Kerja, yang berasal dari anggota LPN.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) adalah:



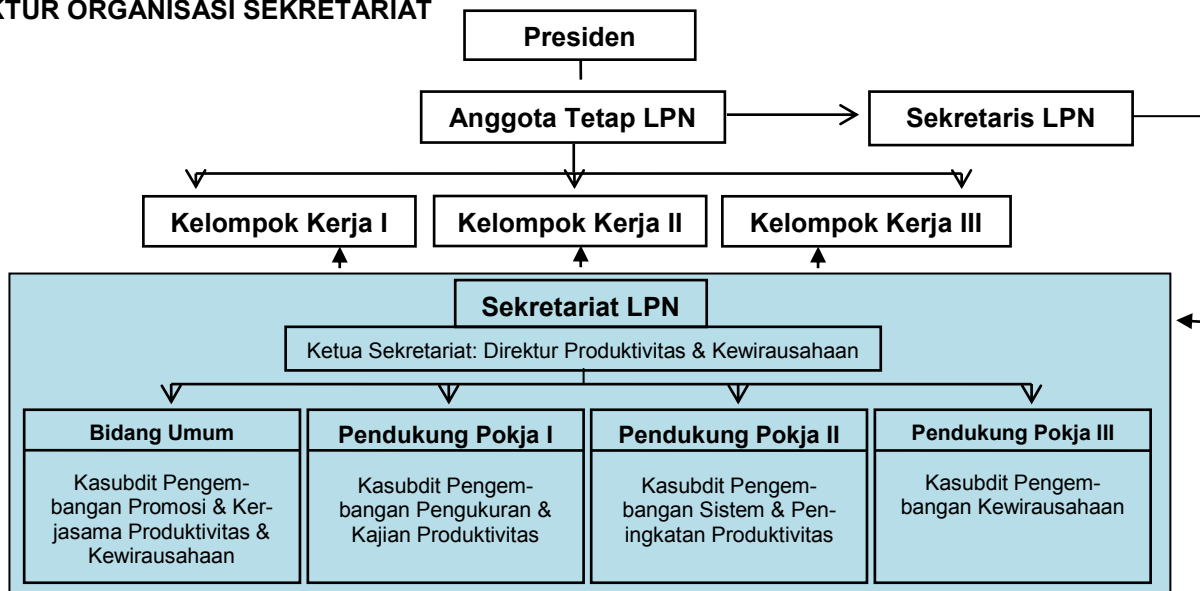
BAGIAN 2 SEKRETARIAT LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Produktivitas Nasional maka dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional berada dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., yaitu Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan, Ditjen Binalattas, Kemnakertrans R.I.

A. FUNGSI SEKRETARIAT

1. Memberikan dukungan administrasi dan teknis rapat Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)
2. Memfasilitasi rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat Gabungan Pokja, Rapat Khusus dan Rapat Pleno

B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT



C. TUGAS SEKRETARIAT POKJA

1. **Bidang umum** sekretariat bertanggung jawab dalam hal: Persuratan, Penjadwalan rapat, keuangan, data base, logistik, publikasi, promosi pelaporan, pers release dan fasilitasi rapat pleno, rapat gabungan pokja, rapat khusus dan rapat pleno.
2. **Sekretariat Pendukung Pokja I** bertanggungjawab dalam hal: Jadwal rapat, tempat rapat, bahan rapat, kelengkapan rapat, pelaksanaan rapat, notulen dan release hasil rapat kelompok kerja I.
3. **Sekretariat Pendukung Pokja II** bertanggungjawab dalam hal: Jadwal rapat, tempat rapat, bahan rapat, kelengkapan rapat, pelaksanaan rapat, notulen dan release hasil rapat kelompok kerja II.
4. **Sekretariat Pendukung Pokja III** bertanggungjawab dalam hal: Jadwal rapat, tempat rapat, bahan rapat, kelengkapan rapat, pelaksanaan rapat, notulen dan release hasil rapat kelompok kerja III.

D. FUNGSI SEKRETARIAT POKJA

1. **Bidang umum** mempunyai fungsi antara lain: Surat menyurat LPN, Data based anggota, SK Menteri dan Dirjen Anggaran, Kajian LPN bersama Pokja terkait, Promosi dengan Pokja, Maskot dan website, Brosur, Laporan LPN, Persiapan dan penyelenggaraan rapat pleno, Undangan, TOR dan konfirmasi kehadiran, Penyelenggaraan rapat paripurna, Notulen, Press Release dan wawancara.
2. **Subdit Pendukung pokja** mempunyai fungsi antara lain:
 - a) Menyusun Daftar nama anggota Pokja
 - b) Menyusun Rancangan Program Kerja Pokja & TORnya
 - c) Mengundang Nara sumber dan undangan tamu dari instansi terkait
 - d) Menyiapkan Surat Undangan Rapat Pokja
 - e) Menyelenggarakan Rapat Pokja yaitu DaftarHadir, Konsumsi, Transport, Kajian dan Notulen rapat pokja

E. FOKUS KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Pokja I :

- ⇒ Promosi Produktivitas
- ⇒ Sentra Produktivitas, dan
- ⇒ Upah Minimum dan Produktivitas
- ⇒ Jejaring Kementerian dan Lembaga Non Kementerian

2. Pokja II :

- ⇒ Labour Market Efficiency
- ⇒ Diklat Produktivitas
- ⇒ Jejaring dengan Dunia Bisnis

3. Pokja III :

- ⇒ Etos Kerja dan Budaya Produktif
- ⇒ Jejaring dengan Daerah

BAGIAN 3

JENIS DAN TATA CARA RAPAT LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mengadakan beberapa rapat-rapat.

A. JENIS RAPAT

1. Rapat Kelompok Kerja (Pokja)
2. Rapat Gabungan Kelompok Kerja
3. Rapat Khusus
4. Rapat Pleno

B. TATA CARA RAPAT

1. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) dilaksanakan minimal 1x2 bulan yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja;
2. Rapat Gabungan Kelompok Kerja dipimpin oleh salah satu Ketua kelompok kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
3. Rapat Khusus dipimpin oleh salah satu anggota kelompok kerja yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai kebutuhan;
4. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, dipimpin oleh Ketua LPN;

Sedangkan dalam proses inisiatif dan substansi rapat Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) berasal dari Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris LPN, Anggota Tetap LPN (Kementerian/Lembaga) dan Sekretariat LPN.

Tata administrasi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) yang terdiri dari Logo, Maskot, Slogan dan Tata Naskah.

1. Logo

Adapun Logo Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) adalah:

a. **Bentuk Dasar Tangan dan Struktur Segitiga**

Mewakili sifat kerja keras dan Dinamika kebutuhan dan Sosialisasi yang baik

b. **Panduan Unsur stilasi Motif Batik Rereng**

Melambangkan makna Gotong-royong, Kesenambungan, dan Kerja yang Sistematis dan Rasional

c. **Tangan**

Merupakan Simbolisasi Semangat dan Daya Juang

d. **Warna Jingga dan Kuning**

Merupakan Simbol Semangat dan Daya Juang

e. **Impresi Visual**

Berkesan Api dan Bunga merupakan simbolisasi Semangat untuk Tumbuh Berkembang Terus Menerus, mencapai yang terbaik



Tata administrasi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) yang terdiri dari Logo, Maskot dan Slogan .

2. Maskot

Adapun Maskot Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) adalah:



a. Bintang Semut

Makna : Seekor binatang yang kecil yang mempunyai beberapa keistimewaan:

- ⇒ mampu menarik 6 kali berat badannya : dia mempunyai kekuatan dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan;
- ⇒ Ketika berada dalam suatu tempat, mereka sangat baik dalam gotong royong;
- ⇒ Apabila membawa suatu barang, maka sebegini menarik dan sebagai mendorong, ini bermakna kerjasama yang kompak;
- ⇒ Yang lebih bermasyarakat, apabila bertemu diantara semut / berpapasan, pasti keduanya berhenti dan saling menegur dan mengucapkan salam yang didahului dengan jabatan tangan;
- ⇒ Dari segi makanan favoritnya adalah gula, sampai-sampai dibuat suatu pepatah kata "ada gula ada semut";

b. Buku dan Pulpen

Makna : Selalu mengevaluasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rangka "*continous improvement*"

c. Slogan

Slogan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) adalah "*moving together for better achievement*".

BAGIAN 5 RISET DAN KAJIAN

Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dalam menunjang tugas dan fungsi untuk memberi saran dan kebijakan mengenai peningkatan produktivitas kepada Presiden, maka anggota LPN melakukan riset dan kajian. Adapun format Riset dan Kajian sebagaimana terlampir.